

## BAB II

### STUDI PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan banyak literatur-literatur yang digunakan untuk membantu penulis menyelesaikannya. Literatur-literatur tersebut di ambil dari skripsi, tesis, jurnal, buku dan lain sebagainya. Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang hampir relevan dengan tema yang diangkat peneliti yakni sebagai berikut :

*Pertama*, skripsi tahun 2010, karya Wahyu Rahma Dani, mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, "*Partisipasi Politik Pemilih Peula Dalam Pelaksanaan Pemilu 2016 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*". Skripsi ini menganalisis penyebab meningkatnya jumlah pemilih pemula di Desa Punguh. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dijelaskan menggunakan diskriptif analitik. Hasil penelitian skripsi ini adalah meningkatnya pemilih pemula di Desa Punguh sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan pemilu 2016.<sup>11</sup>

*Kedua*, skripsi tahun 2013, karya Sabir Baco, mahasiswa dari jurusan ilmu politik, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, "*Partisipasi Politik Masyarakat Dalam*

---

<sup>11</sup>Wahyuni Rahmi, Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu 2016 di Desa Puguh.

*Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar*".<sup>12</sup> menganalisis tentang perilaku atau keikutsertaan masyarakat kelurahan jongaya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mencoba menganalisis peran KPU dalam meningkatkan budaya pemilih. Hasil penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat Jongaya terbilang tinggi dalam menggunakan hak suara mereka pada pilpres 2009.

**Ketiga**, skripsi Kamaludin tahun 2016 yang berjudul "Pendidikan Politik Hubungannya Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015). Skripsi ini menganalisis pengaruh dan peran lembaga pemerintahan seperti KPU dan lembaga masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah faktor geografis dan pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya.<sup>13</sup>

**Keempat**, skripsi tahun 2014, karya Muhammad Iksan, mahasiswa dari Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, "*Pengaruh Perilaku Pemilih*

---

<sup>12</sup>Sabir Baco, Partisipasi politik Masyarakat Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar, 2013

<sup>13</sup>Skripsi Kamaludin "Pendidikan Politik Hubungannya Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015). Tahun 2016 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

*Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Kota Pagalaram Putaran Kedua*” Skripsi ini menganalisa tentang (Studi Perilaku Pemilih Di Kecamatan Pagalaram Utara).<sup>14</sup> Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah kurangnya perilaku pemilih dalam pemilihan walikota kota pagalaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif analitik. Hasil penelitian ini adalah pengaruh perilaku pemilu sangat di tentukan oleh peran masyarakat.

**Kelima**, skripsi tahun 2007, karya Hendri Koeswara<sup>9</sup>, dari Universitas Andalas Sumatera Barat, “ *Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Pada Pilkada Di Sumatera Barat 2005* “, yang mengkaji tentang partisipasi politik perempuan pada pilkada di sumatera barat yang dimana hanya berfokus pada bagaimana partisipasi politik perempuan. Masalah dari penelitian ini adalah tingginya pengaruh partisipasi politik perempuan dalam pemilihan di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah tingginya partisipasi politik perempuan sangat mempengaruhi harapan dan aspirasi perempuan untuk terjun ke dunia politik.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Muhammad Asdar, *Partisipasi Politik masyarakat Kecamatan kindang Dalam Pemilu Kada (Bupati) Putaran Ke II tahun 2010 Kabupaten Bulukumba*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2010.

<sup>15</sup>Hendri Koeswara, “ *Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Pada Pilkada Di Sumatera Barat 2005* “, Universitas Andalas Sumatera Barat, 2007.

## **2.2 Kerangka Teori**

Dalam studi penelitian. Peneliti telah mempelajari konsep dan teori-teori yang ada kaitanya dengan penelitian untuk digunakan dalam merumuskan hipotesis, *variabel setting*, kerangka konseptual, serta pedoman untuk melakukan studi penelitian tentang Perilaku Pemilih Masyarakat Desa SukaRaja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara (Analisa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020)” dengan menggunakan konsep, teori, dokumen dan penelitian terkait.

### **2.2.1 Perilaku Pemilih (Voting Behavior)**

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seorang pemilih untuk menentukan pilihannya dalam sebuah pemilihan. Hal semacam ini bisa berupa pertimbangan apa yang menjadi penentu seseorang untuk memilih pasangan calon ketika momen pemilihan umum. Menurut Miriam Budiarmo, perilaku pemilih merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memberikan hak pilih kepada pemimpin negara secara langsung.<sup>16</sup>

Kecenderungan perilaku politik masyarakat Indonesia di pengaruhi oleh budaya masyarakat. Menurut

---

<sup>16</sup>Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka, 2001).

Zainuddin A. Rakhman, secara sosio cultural, masyarakat Indonesia memiliki elemen-elemen budaya yang bersifat dualis dalam pola-pola budaya politiknya. Dualism tersebut secara garis besar berkaitan dengan tiga hal, yaitu (1) dualisme antara kebudayaan yang mengutamakan tentang keharmonisan dan kedinamisan, (2) dualism antara budaya dan tradisi yang mengutamakan keleluasaan dan keterbatasan, dan (3) dualism yang merupakan implikasi masuknya nilai-nilai barat di dalam masyarakat Indonesia.<sup>17</sup>

Selain dipengaruhi oleh Faktor-aktor tersebut, perilaku politik masyarakat juga di pengaruhi oleh agama dan keyakinan. Agama telah memberikan nilai-nilai etika dan moral politik yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam perilaku politiknya. Keyakinan atau agama apapun merupakan pedoman atau acuan yang penuh dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang dapat mendorong dan mengarahkan perilaku politik sesuai dengan agama dan keyakinannya. Proses-roses politik dan partisipasi warga paling tidak dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman seseorang.

---

<sup>17</sup>Ramlan, Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1995), Hal : 139.

### **a. Faktor Rasional**

Pendekatan teoritis Rational Choice ditekankan pada untung rugi sebagaimana halnya kaitannya dengan politik. Dari pendekatan pilihan rasional, yang menentukan dalam pemilu bukanlah adanya ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural atau ikatan partai yang kuat, melainkan hasil penilaian dari warga yang baik. Pilihan rasional diadopsi dari ilmu ekonomi dimana menekankan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Hal ini selaras dengan perilaku politik yaitu seseorang memutuskan memilih kandidat tertentu setelah mempertimbangkan untung ruginya sejauh program-program yang diberikan oleh kandidat tersebut akan menguntungkan dirinya, atau sebaliknya malah merugikan. Sehingga pemilih akan cenderung memilih kandidat yang kerugiannya minim.

Teori pilihan rasional merupakan sebuah teori yang disuguhkan Coleman dalam sebuah jurnalnya yang berjudul Rational Choice Theory. Teori pililan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Coleman selajutnya menyinggung masalah adanya aktor yang memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau memuaskan

keinginan dan kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman. Yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman menjelaskan interaksi antara aktor dan sumber daya secara rinci menuju ke tingkat sistem sosial: Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak yang lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan. Terlibat dalam sistem tindakan, selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingan yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka.<sup>18</sup>

Teori pilihan rasional adalah teori ekonomi Neo-Klasik yang diterapkan pada sektor publik. Dia mencoba membangun jembatan antar ekonomi mikro dan politik dengan melihat tindakan warga negara, politisi dan pelayanan publik sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi produsen dan konsumen (Buchanan 1972). Teori

---

<sup>18</sup>George Ritzer & Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana. hlm. 394

pilihan rasional adalah teori ekonomi Neo-Klasik yang diterapkan pada sektor publik. Dia mencoba membangun jembatan antar ekonomi mikro dan politik dengan melihat tindakan warga negara, politisi dan pelayanan publik sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi produsen dan konsumen (Buchanan 1972). Teori pilihan rasional sering pula disebut sebagai teori tindakan rasional (Rational Action Theory) teori ini pada awalnya berpengaruh kuat pada analisis-analisis ekonomi, tetapi kemudian diadopsi pula oleh sosiologi, psikologi dan ilmu politik bahkan ilmu humaniora. Meskipun teori pilihan rasional itu pada awalnya berakar pada sosiologi Max Weber, tetapi didalam sosiologi populer sekitar tahun 1990-an , mulai masuk kedalam asosiasi amerika setelah muncul penerbitan jurnal Rationality and Society pada tahun 1998 dan berdirinya seksi pilihan rasional (Rational Choice Section) pada tahun 1994 di negara tersebut dalam penggolongan Poloma (2000) teori pilihan rasional pada perspektif sosiologis naturalistik yaitu bagian penggunaan matematika dalam teori sosiologi.

#### **b. Faktor Psikologis**

Psikologi lebih dari pekerjaan bagi seseorang profesional. Ia merupakan ideologi yang dibentuk dan praktik yang dibangun secara alami dari tingkah laku

masyarakat kapitalis kita dan fungsi-fungsi yang menyangga masyarakat. Meskipun dalam beberapa hal dalam pekerjaan profesional psikologi dan psikiatri sungguh menyesatkan (menjadi saksi atas keberhasilan operasi pembedahan jiwa, pengobatan dengan kejutan listrik, dan perubahan perilaku dalam menentang para tawanan), sebagian besar manipulasi psikologi tetap tersembunyi. Tersembunyi di bawah permukaan kata-kata hampa ilmu pengetahuan sosial. Psikologi industri berhubungan erat dengan rumah sakit pemerintah dalam mendisiplinkan kelas pekerja, menciptakan bermacam-macam tipu muslihat yang berharga dan terkenal untuk melumpuhkan penindasan dan tindakan revolusioner berikutnya.<sup>19</sup>

Hal pertama yang muncul dalam pikiran banyak orang ketika mereka mendengar kata “psikologi” adalah kesehatan mental, terapi dan rumah sakit jiwa. Benar, itu adalah sebagian besar dari psikologi, tapi itu tidak alami. Fungsi-fungsi kontrol sosial atas “penyakit mental” adalah sebagian dari keseluruhan kerja psikologi partikularitas fungsi ini benar ketika kita melihat fenomena rumah sakit negeri/pemerintah sebagai sebuah tempat perawatan utama rakyat kelas pekerja, ketika kita melihat psikologi

---

<sup>19</sup>Phil Brown, *psikologi Marxis* (Yogyakarta : Alinea 2005), Hal : 1-2

menyalahgunakan sistem penjara, dan ketika kita mengamati rasisme dan seksisme dalam industri kesehatan mental.

### **c. Faktor Sosiologis**

Sosiologi termasuk ilmu yang paling muda dari ilmu-ilmu sosial yang dikenal. seperti ilmu yang lain, perkembangan sosiologi dibentuk oleh *setting* sosialnya dan sekaligus menjadikannya sebagai basis masalah pokok yang dikaji. Awal mula perkembangan sosiologi bisa di acak pada saat terjadinya revolusi perancis, dan revolusi industri yang terjadi sepanjang abad ke-19 menimbulkan kekwatiran,kecemasan dan sekaligus perhatian dari para pemikir diwaktu itu tentang dampak yang ditimbulkan dari perubahan dahsyat di bidang politik dan ekonomi kapitalistik di masa itu.<sup>20</sup>

Kelahiran sosiologi, lazimnya dihubungkan dengan seorang ilmuan prancis bernama Aguste Comte (1798-1857), yang dengan kreatif telah menyusun sintesa berbagai macam aliran-aliran pemikiran, kemudian mengusulkan untuk mendirikan ilmu tentang masyarakat dengan dasar filsafat empiris yang kuat. Ilmu tentang masyarakat itu pada awalnya Aguste Comte di beri nama “Social Physics” (Fisika

---

<sup>20</sup>H. Zulfi Mubaraq, *Sosiologi agama* ( Juni tahun 2010), Hal : 1-2

sosial), kemudian dirubahnya sendiri dengan “Sociology” karena istilah fisika sosial tersebut dalam waktu yang bersamaan digunakan oleh seorang ahli statistik sosial belgia bernama Adophe Quetelet. Sejak awal kelahirannya, sosiologi banyak dipengaruhi oleh filsafat sosial. Tetapi berbeda dengan filsafat sosial. Tetapi, berbeda dengan filsafat sosial yang banyak dipengaruhi ilmu alam dan memandang masyarakat sebagai “mekanisme” yang dikuasai hukum-hukum mekanis, sosiologi lebih menempatkan warga masyarakat sebagai individu yang relatif bebas, para filsuf sosial, seperti plato dan aristoteles, umumnya berkeyakinan bahwa seluruh tertib dan keteraturan dunia dan masyarakat langsung berasal dari suatu tertib dan keteraturan yang dimanusiawi, abadi, tidak terubahkan dan ahistoris. Sementara sosiologi justru mempertanyakan keyakinan lama dari pada filsuf itu dan akhirnya muncullah keyakinan baru yang dipandang lebih mencerminkan relatif sosial yang sebenarnya.<sup>21</sup>

### **2.2.2 Partisipasi Politik**

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Huntington dan Nelson,

---

<sup>21</sup>H. Zulfi Mubaraq, *Sosiologi agama* ( UIN-Maliki Pers, Gajayana 50 Malang, Juni tahun 2010), Hal : 2-3

memberikan definisi bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.<sup>22</sup>

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>23</sup> Dari definisi tersebut, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah partisipasi politik bukan semata sikap-sikap, namun merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat empiris, merupakan kegiatan warga Negara asli, bukan individu-individu yang bermain di wilayah pemerintahan; pokok perhatiannya adalah kegiatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, dan kegiatan tersebut tidak memperdulikan berhasil tidaknya tujuan yang hendak

---

<sup>22</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007, hlm. 140

<sup>23</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 367

dicapai, yaitu mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah.

Partisipasi politik banyak diwujudkan dalam berbagai bentuk, beberapa diantaranya adalah lobbying kegiatan organisasi, mencari koneksi, tindak kekerasan (*violence*), dan kegiatan pemilih. Kegiatan yang terakhir ini mencakup suara sekaligus sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan<sup>24</sup> Secara lebih spesifik, budiarjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau parlemen dan sebagainya.

---

<sup>24</sup>Bappenas dan Depdagri. *Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*. 2002. Hal 25

## **1. Mode Partisipasi Politik**

Mode partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Mode ini terbagi menjadi 2 bagian besar: Conventional dan Unconventional adalah mode klasik partisipasi politik seperti pemilu dan kegiatan kampanye. Mode partisipasi politik sudah cukup lama ada, tepatnya saja tahun 1940-an dan 1950-an. Unconventional adalah mode partisipasi politik yang tumbuh seiring dengan munculnya gerakan sosial baru (New Social Movements). Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan (environmentalist), gerakan perempuan gelombang 2 (feminist). Protes mahasiswa (students protest), dan teror.

## **2. Bentuk Partisipasi Politik**

Jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi: Kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon

legislative atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu<sup>25</sup>.

*Lobby* yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu; kegiatan organisasi yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pimpinannya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. *Contacting* yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan Tindakan kekerasan (*violence*) yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kegiatan fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan. Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau

---

<sup>25</sup>Bappenas dan Depdagri. *Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*. 2002. Hal 27

illegal.

Sebab itu, penyuapan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk kedalam kajian ini. Kualifikasi bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson relative lengkap. Hampir setiap fenomena bentuk partisipasi politik kontemporer dapat dimasukkan kedalam klasifikasi mereka. Namun, Huntington dan Nelson tidak memasukkan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan diskusi politik, menikmati berita politik, atau lainnya yang berlangsung di dalam skala subyektif individu.

### **3. Dimensi Subyektif Individu**

Dimensi subyektif adalah serangkaian factor psikologi yang berpengaruh terhadap kepentingan seseorang untuk terlibat dalam partisipasi politik. Factor-faktor ini cukup banyak, yang untuk kepentingan tulisan ini hanya akan diajukan 2 jenis saja yaitu Political Disaffection dan Political Efficacy<sup>26</sup>.

### **4. Political Disaffection**

*Political Disaffection* adalah istilah yang mengacu pada perilaku perasaan negative individu atau kelompok

---

<sup>26</sup>Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) Hal, 37

terhadap suatu system politik. Penyebab utama dari Political Disaffection ini dihipotesiskan adalah media massa, terutama televisi, Hipotesis tersebut diangkat dari kajian “videomalaise”.

Dengan banyaknya individu menyaksikan acara televise, utamanya berita-berita politik, maka mereka mengalami keterasingan politik (political alienation). Keterasingan ini akibat melemahnya dukungan terhadap struktur-struktur politik yang ada di sistem politik seperti parlemen, kepresidenan, kehakiman, partai politik, dan lainnya. Individu merasa bahwa struktur-struktur tersebut di anggap tidak lagi memperhatikan kepentingan mereka. Wujud kwtwrasingan ini muncul dalam bentuk sistem politik berupa protes-protes, demonstrasi-demonstrasi, dan huru-hara. Jika tingkat political disaffecition tinggi, maka para individu atau kelompok cenderung memilih bentuk partisipasi yang sanis ini.

*Political Efficacy* adalah istilah yang mengacu pada perasaan bahwa tindakan politik (partisipasi politik) seseorang dapat memiliki dampak terhadap proses-proses politik. Keterlibatan individu atau kelompok dalam partisipasi politik tidak bersifat pasti atau permanen melainkan berubah-ubah. Dapat saja seseorang yang menggunakan haknya untuk memiliki di suatu periode,

tidak menggunakan hak tersebut pada periode lainnya, secara teroris, ikut atau tidaknya individu atau kelompok kedalam bentuk partisipasi politik bergantung pada *political-political Efficacy* ini<sup>27</sup>. *Political efficacy* terbagi 2 yaitu eksternal *political Efficacy* dan internal *political Efficacy*, eksternal *political Efficacy* di tunjukkan kepada sistem politik, pemerintah, atau Negara dan diwakili dengan pernyataan nomer 1 dan 3. Sementara internal *political Efficacy* merupakan kemampuan politik yang dirasakan di dalam diri individu, yang diwakili pernyataan nomor 2 dan 4. Dari sisi stabilitas politik, sebagian peneliti ilmu politik menganggap bahwa stabilitas politik akan lahir jika tingkat internal *political Efficacy* rendah dan tingkat eksternal *political Efficacy* tinggi.

Dalam politik moderen partisipasi politik merupakan hal yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungan Negara-negara berkembang, pada awalnya studi mengenai partisipasi politik mengacu pada partai politik, namun dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembuatan

---

<sup>27</sup>Christina Hostz-Bacha, *Political Disaffection*, dalam Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, *Encyclopedia of Political Communication*, (California : Saga Publications, 2008 Hal. 577

kebijakan umum<sup>28</sup>. Masyarakat atau kelompok terdorong oleh rasa kekecewaan terhadap kinerja partai politik dan cenderung memusatkan perhatian pada suatu masalah tertentu saja. definisi partai partisipasi politik secara umum adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan umum. Hal yang diutamakan dalam partisipasi politik sebenarnya adalah keterlibatan masyarakat atau kelompok dalam pengambilan kebijakan- kebijakan atau keputusan pemerintah.

Partisipasi politik merupakan pengejawentahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang abash oleh rakyat. Partisipasi politik juga erat kaitannya dengan kesadaran politik, dimana jika semakin masyarakat tersebut di atur, dan apabila masyarakat semakin sadar, masyarakat tersebut akan menuntut untuk diberikan hak suara dalam penyelenggaraan pemerintahan, kesadaran dalam partisipasi politik dimulai dari kaum berpendidikan atau kaum terkemuka<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup>Oscar Garcia Luengo, *E-Activism New Media and Political Participation* (in Erope, London, 2006), Hal : 9.

<sup>29</sup>Ramlan, Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1995), Hlm.139.

Di Negara-negara demokrasi mempunyai anggapan bahwa lebih banyak partisipasi politik, maka semakin baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dari kegiatan-kegiatan itu. Partisipasi politik dalam hal ini sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah, apakah keputusan yang diambil pemerintah telah mencakup kebutuhan masyarakat atau belum.

### **2.2.3 Pendidikan Politik**

Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.<sup>30</sup> Selanjutnya dari pendidikan politik tersebut individu mampu memahami secara penuh dengan apa yang diterima sebelumnya. Sehingga dari proses kebijakan

---

<sup>30</sup> Kantaprawira Rusadi, 2004. Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi, Sinar Baru Algensindo, Bandung. Hlm. 55

setiap individu mampu mengaplikasikannya pada proses selanjutnya, yaitu proses politik Pemilihan Umum (Pemilu).

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2012 mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpol, kebijakan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol kepada bertujuan sarana pembentukan karakter kepemimpinan kepada generasi muda seta untuk membangun sebuah peradaban politik yang lebih baik. Pendidikan politik sudah menjadi kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya oleh Bakesbangpol, demi membangun kematangan demokrasi yang lebih beradab. Dengan adanya pendidikan politik diharapkan masyarakat maupun generasi muda bisa melek politik.<sup>31</sup> Pendidikan politik saat ini mempunyai tujuan pokok antara lain adalah: partisipasi politik rakyat, keterpihakan dalam konflik umum terbuka, dan keikutsertaan dalam menentukan kebijakan publik. Maka keberanian menentukan pendirian sendiri secara otonom sangat diutamakan dalam pendidikan politik, dalam pendidikan politik untuk menentukan arah perjuangan politik ditengah banyak konflik yang disebabkan oleh perbedaan

---

<sup>31</sup> Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kesbangpol

kepentingan. Jadi secara tidak langsung pendidikan politik telah mempengaruhi individu dalam perjuangan politik guna mencapai penyelesaian konflik yang menguntungkan semua pihak.

Untuk menumbuhkan partisipasi dari setiap masyarakat maupun generasi muda, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar mutlak dilakukan. Pendidikan politik ini selain di berikan oleh pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik juga melalui lembaga-lembaga non formal seperti Partai Politik dan organisasi-organisasi masyarakat. Pendidikan politik dalam hal ini dipahami sebagai perbuatan untuk memberikan ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dari diri manusia. Badan Kesatuan Bangsa Politik melaksanakan pendidikan politik melalui sosialisasi dan menghadirkan narasumber dari praktisi politik dan juga audience yaitu generasi muda. Sehingga dari penerima pesan (generasi muda) dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Pelaksanaan atas hak pendidikan sangat penting dalam memenuhi hak asasi manusia (HAM), seperti hak atas pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik. Hak mengenai jaminan dan perlindungan negara terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara, seperti

hak menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama dihadapkan hukum dan pemerintahan serta hak mendapatkan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2015.<sup>32</sup>

#### **A. Mekanisme Pelaksanaan Program Pendidikan Politik**

Mekanisme program pendidikan politik ialah tata cara atau teknik penanaman atau pembentukan nilai-nilai politik yang telah ada dalam dirinya. Mekanisme dalam implementasi kebijakan pendidikan politik biasanya dibuat standart operation prosedur (SOP), SOP nantinya menjadi pedoman bagi pelaksana program dalam bertindak . Agar dalam pelaksanaan kebijakan program pendidikan politik dari tujuan dan sasaran kebijakan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda terdapat 3 mekanisme: Pertama, merupakan yang paling rendah dan lebih mudah untuk dicapai, yaitu dengan pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan yang berhubungan dengan kesadaran politik. dalam istilah lain sering disebut *cognitif morality*. Kedua, berhubungan dengan masalah sikap (*afektif*). Pada tahap ini memerlukan lebih banyak usaha dan pematangan.

---

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Jaminan dan Perlindungan Negara

Sedangkan tahap terakhir berhubungan dengan masalah perilaku atau tindakan yang dilakukan setelah seseorang mendapatkan pendidikan politik Tahapan<sup>33</sup> tahapan pendidikan politik ada beberapa yaitu :

➤ **Fasilitasi Pendidikan Politik**

Pelaksanaan pendidikan politik yang diselenggarakan Bakesbangpol sendiri melalui sosialisai, Sosialisasi pendidikan politik merupakan pembelajaran bagi setiap generasi muda (pemilih pemula) <sup>34</sup>dalam mengikuti kegiatan pemilu kada atau sebagainya. Dari pembelajaran tersebut generasi dituntut agar nantinya masing-masing individu memiliki kesadaran penuh dan dapat memberikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yaitu dengan ikut berpartisipasi politik dengan mengikuti pencoblosan pemilihan umum.

➤ **Website dan Media sosial**

Perkembangan informasi dan teknologi terus berkembang dengan seiring berjalan waktu, hal ini membuat segala informasi dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang. Perkembangan informasi dan teknologi banyak

---

<sup>33</sup> Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda

<sup>34</sup>Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah: 1) Umur sudah 17 tahun, 2) Sudah/ pernah kawin; dan 3) Purnawirawan/ Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian. Modul 1 KPU Nasional Pemilu untuk Pemilih Pemula (2010:48)

mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu sudah dapat diakses secara online oleh masyarakat. Hal ini merupakan bentuk kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini. Seiring perkembangan informasi dan teknologi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melakukan terobosan yaitu dengan pemberian pendidikan politik melalui media sosial facebook, twitter dan juga instagram. Perkembangan informasi dan teknologi tentunya dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi kepada setiap orang. Dengan tersebarnya informasi melalui media sosial tersebut, pelaksanaan pendidikan politik tidak harus mendatangkan tetapi juga dibarengi dengan penggunaan media sosial sebagai media informasi kepada generasi muda. Tentunya hal tersebut sesuai dengan perkembangan jaman saat ini.

- **Sosialisasi Pemilu** Salah satu bentuk pendidikan politik yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu pendidikan politik pemilu berkerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum. Sosialisasi tersebut biasanya melibatkan pengurus parpol, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas dan masyarakat. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada para peserta agar

mengetahui segala tahapan yang akan dilakukan oleh KPU maupun Panwas terkait pelaksanaan Pemilihan Umum. Dan juga Sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya Pemilu/Pilkada bagi warga masyarakat agar dapat memenuhi hak konstitusinya sebagai warga negara.

Sosialisasi tersebut merupakan pemahaman bagi masyarakat serta generasi muda terkait dengan agenda-agenda politik seperti tujuan diadakannya pemilu, jadwal pelaksanaan pemilu, cara memberikan suara, pemahaman terkait suara sah dan tidak sah. Sosialisasi pemilu disini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat secara langsung, agar masyarakat mengetahui bagaimana proses pemilu yang sesungguhnya.

## **B. Implementasi Program Pendidikan Politik**

Implementasi pendidikan politik ini, ada tiga tujuan dari pembangunan pendidikan politik pertama, membentuk kepribadian politik, kedua kesadaran politik, ketiga partisipasi politik. Kepribadian politik adalah sebuah sikap individu terhadap suatu permasalahan politik yang akan menentukan tingkat kesadaran politik seseorang, hal ini dapat kita lihat melalui tingkat pendidikan atau pengetahuan individu dalam permasalahan politik

sehingga dia mampu memposisikan diri dari kondisi tersebut dalam sebuah partisipasi positif. Tingkat partisipasi dan kecerdasan publik akan berkorelasi pada kualitas demokrasi dan produk-produk demokrasi seperti peraturan perundang-undangan yang baik bagi kualitas pelayanan publik

### **2.3. Kerangka Berfikir**

Keikutsertaan warga negara dalam suatu pemilihan umum dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 merupakan serangkaian kegiatan keputusan yakni ikut serta memberikan Hak Suara atau tidak. Berkaitan dengan pengertiannya perilaku memilih adalah salah satu kegiatan/tindakan politik dalam sebuah pemilihan dimana didalam menentukan pilihannya, memiliki pendekatan-pendekatan tertentu. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.

Berbicara mengenai Pemilihan Kepala Daerah tentu tidak lepas berbicara mengenai memilih, seperti dalam hal ini perilaku memilih dapat diukur dari bagaimana memilih dalam menentukan pilihannya, misalnya memilih dalam menentukan pilihan berdasarkan Visi, Misi, Prestasi, Kinerja, bisa juga

keterikatan emosional pemilih terhadap tokoh tertentu baik calon ataupun tokoh-tokoh pendukung calon yang akan dipilih. Berdasarkan uraian kerangka teoritis, maka peneliti membuat kerangka berfikir mengenai gambaran secara umum dari isu atau studi kasus yang dibahas yaitu terkait Perilaku Pemilih Masyarakat:

